PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019-2023

Dewi zulvia[1], Doni Satria[2]
Email: dewizulvia@akbpstie.ac.id[1], satria.kapa25@gmail.com[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP
Jl. Khatib Sulaiman No.61, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 12 kabupaten/kota melalui teknik total sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka potensi kontribusi terhadap PAD juga meningkat, misalnya melalui pajak daerah, retribusi, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa dalam periode tersebut tidak secara langsung memengaruhi besaran penerimaan PAD, kemungkinan karena pemerintah daerah memiliki strategi atau kebijakan yang mampu meredam dampak inflasi terhadap penerimaan daerah.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Inflasi, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to examine the effect of population and inflation on Local Own-Source Revenue (PAD) in the Regencies/Cities of West Sumatra Province from 2019 to 2023. This is a quantitative study using a total sample of 12 regencies and cities (total sampling method). The data analysis techniques employed include multiple linear regression, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of the study show that the population variable has a positive and significant effect on local own-source revenue. This indicates that a larger population tends to contribute more to PAD, for instance through local taxes, service charges, and increased economic activity. In contrast, the inflation variable does not have a significant effect on PAD when tested partially. This suggests that price fluctuations during the observed period did not directly influence the amount of local revenue, possibly due to the implementation of effective local government strategies or policies that mitigated the impact of inflation on regional income.

Keywords : Population, Inflation, Local Original Income

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi yang berbeda-beda disetiap daerahnya. Dalam menghadapi keadaan tersebut maka dilakukan upaya pembangunan yang lebih merata di masing-masing daerah tersebut. Untuk melakukan pembangunan ini tidak terlepas dari pembangunan daerah yang menjadi salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional itu sendiri. Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengetahui segala potensi yang dapat menjadi kebutuhan daerahnya. Dengan tujuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut agar mampu mencapai keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (8).

Setiap daerah pastinya berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Daerahnya masing-masing, dengan memanfaatkan atau mengelola beberapa potensi yang berada di daerah nya masing-masing (11). Salah satunya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat khususnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mengelola beberapa jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanag, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan hal ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat bisa mewujudkan kemandirian anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun perolehan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi obyek penelitian di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2019-2023 :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2023 (Dalam Ribuan)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Agam	Rp 117.950,00	Rp 125.060,00	Rp 110.530,00	Rp 156.590,00	Rp 210.890,00
Kabupaten Dharmasraya	Rp 90.090,00	Rp 104.790,00	Rp 84.120,00	Rp 92.540,00	Rp 93.690,00
Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 84.990,00	Rp 56.300,00	Rp 55.770,00	Rp 39.800,00	Rp 50.360,00
Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 89.180,00	Rp 100.580,00	Rp 102.720,00	Rp 111.690,00	Rp 109.700,00
Kabupaten Padang Pariaman	Rp 112.910,00	Rp 109.470,00	Rp 131.420,00	Rp 128.500,00	Rp 142.610,00
Kabupaten Pasaman	Rp 91.200,00	Rp 95.920,00	Rp 91.880,00	Rp 87.640,00	Rp 108.390,00
Kabupaten Pasaman Barat	Rp 115.530,00	Rp 142.980,00	Rp 114.210,00	Rp 122.180,00	Rp 131.060,00
Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 152.800,00	Rp 156.420,00	Rp 145.950,00	Rp 139.440,00	Rp 138.430,00
Kabupaten Sijunjung	Rp 74.510,00	Rp 81.240,00	Rp 87.410,00	Rp 95.640,00	Rp 104.880,00
Kabupaten Solok	Rp 71.720,00	Rp 75.300,00	Rp 85.070,00	Rp 88.020,00	Rp 88.120,00
Kabupaten Solok Selatan	Rp 70.000,00	Rp 70.920,00	Rp 75.220,00	Rp 73.540,00	Rp 73.130,00
Kabupaten Tanah Datar	Rp 146.180,00	Rp 165.000,00	Rp 130.570,00	Rp 116.930,00	Rp 140.200,00
Kota Bukittinggi	Rp 116.600,00	Rp 151.440,00	Rp 134.120,00	Rp 139.980,00	Rp 160.750,00
Kota Padang	Rp 824.380,00	Rp 882.000,00	Rp 889.900,00	Rp 989.900,00	Rp 928.650,00
Kota Padang Panjang	Rp 94.980,00	Rp 97.540,00	Rp 91.300,00	Rp 92.300,00	Rp 96.990,00
Kota Pariaman	Rp 35.880,00	Rp 58.860,00	Rp 45.500,00	Rp 47.500,00	Rp 58.960,00
Kota Payakumbuh	Rp 124.610,00	Rp 122.250,00	Rp 107.760,00	Rp 111.510,00	Rp 112.070,00
Kota Sawahlunto	Rp 56.240,00	Rp 61.770,00	Rp 63.490,00	Rp 64.810,00	Rp 70.090,00
Kota Solok	Rp 48.900,00	Rp 46.000,00	Rp 40.840,00	Rp 43.430,00	Rp 44.070,00

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dihasilkan cenderung fluktuatif atau berubah-ubah. Hal ini mengindikasikan tidak konsistennya kenaikan jumlah pertumbuhan pendapatan asli daerah di provinsi ini. Akan tetapi, pencapaian realisasi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun itu tidak menggambarkan kegagalan atau tingkat keberhasilan pemungutan atau

pengelolaan potensi daerah di Provinsi Sumatera Barat yang ada dari tahun ke tahun menurun juga. Hal ini justru membuat atau menggambarkan keberhasilan perencanaan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam presisi yang tinggi, dan perhitungan antara target dengan data potensi yang benar-benar mendekati angka kondisi real yang sebenarnya (15). Naik turunnya Pendapatan Asli Daerah tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi dalam hal optimalisasi PAD yaitu: Kesadaran sebagian wajib pajak dan retribusi masih rendah dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya kinerja pada unit-unit usaha daerah sehingga kontribusi tehadap PAD masih relatif rendah serta keterbatasan SDM pengelola pendapatan.

Potensi keuangan daerah, merupakan salah satu kekuatan dalam menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan. Selain itu, untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat di kendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri. Adapun beberapa faktor-faktor tersebut antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan, perkembangan PDRB, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, dan sumber pendapatan baru (7).

Naik atau turunnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat nya yaitu dalam menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri, salah satunya dapat diindikasikan dengan jumlah penduduk dan Inflasi, keduanya merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan yang ada di wilayah tersebut (10).

Jumlah penduduk merupakan banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Menurut sukirno dalam bukunya penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian, karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian akan mudah di dapatkan, dan dengan bertambahnya penduduk maka akan memperluas pangsa pasar. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi (14).

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh ketidaksinkronya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (4). Kebanyakan model inflasi menekankan dampak kenaikan upah pada jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan bahwa ada dua jalur sebab antara jumlah uang beredar atau inflasi karena jumlah uang beredar yang berlebihan. Tingginya inflasi seperti kondisi saat ini akan berakibat terhadap rendahnya daya beli masyarakat, dan sebaliknya, jika kondisi inflasi rendah akan berdampak pada pendapatan masyarakat pula. Dengan demikian akan berdampak terhadap peningkatan PAD pemerintah daerah (10).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan program SPSS 23 (12). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dan data yang akan di ambil ialah data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan data tersebut di ambil di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan juga pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Populasi dikatakan suatu wilayah generalisasi yang mencakup atas objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti supaya dapat dipelajari lebih lanjut sehingga dapat ditarik apa kesimpulannya. Oleh karena itu, didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah sebanyak 12 Kabupaten dan 7 Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat (12).

(13) Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *total sampling*. *Total sampling* adalah salah satu teknik *sampling nonprobability* sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menjadikan seluruh jumlah populasi menjadi sampel. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten. Teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

(3) Analisis statistik deskriptif adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menggambarkan karakteristik data. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang masalah yang dianalisa.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan penelitian ini adalah Uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov.* Uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal *poisson uniforn* atau *exponential* untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi residual terdistribusi tidak normal (3).

Uji Multikolinearitas

(3) Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas di dalam model regresi adalah dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menujukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Jika nilai signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas (3).

Analisis Regresi Linear Berganda

(3) Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih yaitu variabelindependen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel idependen sebagai berikut :

$$Y_i = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y_i = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)
α = Konstanta
$\beta 1$ = Koefisien Regresi Untuk Jumlah Penduduk
$\beta 2$ = Koefisien Regresi Untuk Inflasi
X_1 = Jumlah Penduduk
X_2 = Inflasi
e = eror

Uji Hipotesis

Uji T

Menurut (3) mengemukakan bahwa uji T-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial dapat menggunakan uji beda t-test.

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika T tabel < T hitung maka Ho diterima, dan Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak.
2. Jika T tabel > T hitung maka Ho ditolak dan Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 adalah perbandingan antara variabel Y yang di jelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama dibandingkan dengan variasi total Y. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang di gunakan adalah nilai R *Square.* Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka nilai yang digunakan adalah *adjusted* R *Square*. Untuk mengukur besar nya nilai variabel X1 dan X2 terhadap variasi (naik turun nya) Y digunakan goodness of fit R - Square (R^2) R^2 ini juga disebut dengan koefisien determinasi, dan nilai nya berkisaran antara 0 sampai 1 ($0<R^2<1$) nilai semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terkait (3).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penduduk	Inflasi
Maximum	989.900,00	950.900	5,51
Minimum	35.880,00	53.700	1,68
Mean	141.169,16	284.550	2,88
Standar Deviasi	184.107,33	215.945,3	1,38
Observasi	95	95	95

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

Instansi yang dijadikan sampel adalah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 terdiri dari 12 Pemerintah Kabupaten dan 7 Pemerintah Kota dengan tahun pengamatan yang dijadikan sampel selama 5 tahun yaitu tahun 2019-2023, maka jumlah data observasi yang dikumpulkan berjumlah 95 sampel data.

Variabel Pendapatan Asli Daerah yang di ukur menggunakan realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai minimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar Rp 35.880,00, nilai maksimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar Rp 989.900,00 secara keseluruhan instansi yang dijadikan sampel mempunyai nilai rata-rata dari seluruh sampel sebesar Rp 141.169,16 dengan tingkat standar deviasi Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp 184.107,33.

Variabel Jumlah Penduduk yang di ukur menggunakan total penduduk menunjukkan bahwa nilai minimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar 53.700 Jiwa, nilai maksimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar 950.900 Jiwa secara keseluruhan instansi yang dijadikan sampel mempunyai nilai rata-rata dari seluruh sampel sebesar 284.550 Jiwa dengan tingkat standar deviasi Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 215.945,3 Jiwa.

Variabel Inflasi yang di ukur menggunakan Indeks Harga Konsumen menunjukkan bahwa nilai minimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar 1,68%, nilai maksimum pada salah satu sampel Instansi Pemerintah sebesar 5,51% secara keseluruhan instansi yang dijadikan sampel mempunyai nilai rata-rata dari seluruh sampel sebesar 2,88 dengan tingkat standar deviasi Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 1,38.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Sig (2-Tailed	Alpha	Keterangan
0,098	0,293	Terdistribusi Normal

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

Pada Tabel 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorof Smirnov Test* hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan pengujian *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi normal, maka data tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Jumlah Penduduk (X_1)	1,000	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Inflasi (X_2)	1,000	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung adanya multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sign	Alpha	Kesimpulan
Jumlah Penduduk (X_1)	1,000	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Inflasi (X_2)	1,000	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai dari probabilitas signifikan variabel lebih besar dari > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-51938154055,754	32974688093,630		-1,575	,119
	Jumlah Penduduk	652768,317	57175,199	,766	11,417	,000
	Inflasi	358439266,453	8921500714,817	,003	,040	,968

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

$$Y = -51.938.154.055,75 + 652.768,32\ X_1 + 358.439.266,45\ X_2$$

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa konstanta bernilai negatif sebesar 51.938.154.055,75 ini menunjukkan bahwa tanpa variabel bebas (jumlah penduduk dan inflasi) maka terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yaitu sebesar nilai konstanta yang dihasilkan 51.938.154.055,75. Konstanta negatif umumnya terjadi jika ada rentang yang cukup jauh antara variabel independen dan variabel dependen. Konstanta negatif tidaklah menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama model regresi yang diuji sudah memenuhi asumsi.

Koefesien regresi jumlah penduduk bernilai positif sebesar 652.768,32 artinya setiap peningkatan variable jumlah penduduk sebesar 1 satuan maka variabel X akan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah sebesar 652.768,32 dengan menganggap variabel lain dalam model konstan.

Koefisien regresi inflasi bernilai positif sebesar 358.439.266,45 artinya setiap peningkatan variabel inflasi sebesar 1 satuan maka variabel X akan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah sebesar 358.439.266,45 dengan menganggap variabel lain dalam model konstan.

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig	Kesimpulan
Jumlah Penduduk (X_1)	11,417	1,986	0,000	Diterima
Inflasi (X_2)	0,040	1,986	0,968	Ditolak

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Jumlah Penduduk diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Pengujian hipotesis digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 11,417 > 1,986 dengan nilai Signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2023.

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel Inflasi diperoleh nilai Signifikan sebesar 0,968. Pengujian hipotesis digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,040 > 1,986 dengan nilai Signifikan sebesar 0,968 > 0,05 maka keputusannya H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2023.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Koefisien
R-Square	0,586
Adjust R-Square	0,577

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,577 menjelaskan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 57,70% sedangkan sisanya 42,30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh indikator lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 95 data observasi yang merupakan data yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik bisa disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji nilai t hitung untuk variabel Jumlah Penduduk membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya tinggi atau rendahnya jumlah penduduk mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita *over population*, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin. Namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi kecil.

(10) Penduduk adalah orang-orang di lingkungan sebagai individu, sebuah keluarga, suatu kelompok atau kumpulan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas bagian negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk merupakan sesuatu yang berhubungan dengan banyaknya, identitas, perkembangan, penyebaran, perpindahan, kemampuan, keadaan kesejahtraan yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ruang lingkup kependudukan. Jumlah penduduk sebagai variabel yang berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah dikarenakan Meningkatnya aktivitas penduduk akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan barang dan jasa. sehingga permintaan yang berlebihan akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi akan menimbulkan efek pada perekonomian salah satunya dengan mengurangi pendapatan riil.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian sebelumnya dimana (6) dan (8) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah, ketika di suatu daerah jumlah populasi mengalami peningkatan itu berdampak positif pada penerimaan PAD dengan asumsi bahwa populasi di daerah itu selalu produktif, sehingga mereka mampu membayar pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah, tetapi bahaya ketika pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah karena keadaan miskin dari banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan – kebijakan yang arahnya pada pertumbuhan penduduk/demografi, dan melakukan *controlling* pada usia angkatan kerja.

Penelitian variabel pertama dapat diinterpretasikan bahwa data yang dimaksud data jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan rata-rata jumlah penduduk yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel mencapai 284.550. Tinggi atau rendahnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah karena jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 95 data observasi yang merupakan data yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik bisa disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji nilai t hitung untuk variabel Inflasi membuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya besar atau kecilnya inflasi tidak akan menjadi tolak ukur terhadap pendapatan asli daerah yang direalisasikan instansi pemerintahan. Ketika inflasi naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa. Meskipun harga barang dan jasa naik karena inflasi yang membuat pendapatan mereka berkurang namun ini tidak berakibat pada penerimaan pajak daerah. Selian itu masyarakat berkemampuan tinggi masih mampu menggunakan fasilitas-fasilitas/obyek pajak daerah seperti pergi ke hotel, restoran, hiburan, bayar PBB perkotaan dan obyek pajak daerah lainnya. Sehingga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masih relatif stabil.

(1) Inflasi adalah proses naiknya harga-harga yang berlaku di suatu ekonomi. Sementara itu, menurut Putong, inflasi adalah kenaikan umum harga komoditas karena ketidaksesuaian antara program sistem pengadaan komoditas dan tingkat pendapatan publik. Selain itu, Kenaikan harga umum yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aliran uang dan barang.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian sebelumnya dimana (14) inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Inflasi yang bagus adalah inflasi yang dibawah 10% dan realita data membuktikan bahwa tingkat inflasi seluruh Provinsi di wilayah Indonesia berkisar dibawah 10% seharusnya inflasi tersebut menandakan pertumbuhan ekonomi tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara langsung. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan otonomi daerah, dana perimbangan keuangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah hal ini yang menyebabkan inflasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian variabel kedua dapat diinterpretasikan bahwa data yang dimaksud data inflasi pada pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan rata-rata inflasi yang dimiliki pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel mencapai 2,88. Hal ini berarti instansi akan tetap merealisasikan pendapatan asli daerahnya tanpa memperhatikan besar kecilnya inflasi yang terjadi dengan kata lain variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah. Ketika

instansi memiliki tingkat inflasi yang tinggi, instansi menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat menganggu informasi tentang keuangan instansi. Sebaliknya, pada saat tingkat inflasi rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan melihat kinerja instansi, misalnya dalam pemungutan pajak, dan dengan demikian pendapatan asli daerah akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah, ketika di suatu daerah jumlah populasi mengalami peningkatan itu berdampak positif pada penerimaan PAD dengan asumsi bahwa populasi di daerah itu selalu produktif, sehingga mereka mampu membayar pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah, tetapi bahaya ketika pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah karena keadaan miskin dari banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan – kebijakan yang arahnya pada pertumbuhan penduduk/demografi, dan melakukan *controlling* pada usia angkatan kerja.
2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Inflasi yang bagus adalah inflasi yang dibawah 10% dan realita data membuktikan bahwa tingkat inflasi seluruh Provinsi di wilayah Indonesia berkisar dibawah 10% seharusnya inflasi tersebut menandakan pertumbuhan ekonomi tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara langsung. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan otonomi daerah, dana perimbangan keuangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah hal ini yang menyebabkan inflasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan asli daerah.

Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau gambaran mengenai Pendapatan Asli Daerah dan membantu memberikan pemahaman kepada para wajib pajak di Indonesia dalam mengambil keputusan.
2. Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, dengan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis pendapatan asli daerah untuk masa yang akan datang.
3. Penelitian dimasa mendatang diharapkan bisa menggunakan aplikasi pengolah data lainnya seperti Eviews.
4. Peneliti dimasa mendatang disarankan mencoba memperbanyak jumlah sampel penelitian yang digunakan agar tingkat ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh lebih tinggi.
5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena tidak hanya dua variabel saja, masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Misalnya Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum. Saran tersebut sangat penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Apriyani, D., Nurdiawansyah, Khairudin, & Amna, L. S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Sumatera. *Jurnal EMT KITA*, *7*(4), 985–997. https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1562

[2] Elidawaty Purba, & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, *5*(1), 1–8. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.493

[3] Ghozali, H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. diedit oleh P. P. Harto. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[4] Kaluge, D., Setiawan, N., & Hutomo, W. D. P. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.

[5] Natsir, A. A., Sylvia, S., & Kitta, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Ghendera Buana Jurnal*, *1*(5), 492–506. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj%7C492

[6] Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, *1*(1), 16–35.

[7] Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, *1*(1), 37–56. https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4799

[8] Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018. *Diponegoro Journal of Economics*, *10*(2), 1–10. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje

[9] Purbaningrum, W. T. (2022). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020*. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/104241

[10] Saputra. (2022). *Pengaruh Retribusi Daerah, Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran*. *23*, 1–22.

[11] Sari, P. R. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota se-Eks Karesidenan Surakarta)*. 1–11.

[12] Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

[13] Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

[14] Yusuf, A. (2022). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Di Malang Raya*. *16*(1), 1–23.

[15] Arfianty, A., Arodhiskara, Y., Rosadi, I., & Fatimah, F. (2022). Good Corporate Governance Principles And Company Value: The Impact Of Financial Performance. In *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*.

[16] Dewi, Y., Fajar, A. M., Sampara, N., & Idrus, I. (2024). Analysis of Marketing Strategies in Enchancing Competitive Advantage in the E-Commerce Industry in the Bangking Sector. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 2, No. 2, pp. 854-865).